

# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Di dalam upaya negara untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur maka diperlukan suatu proses yang mengombinasikan aspek sosial, ekonomi, dan institusional dalam melaksanakan proses pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik (Todaro, 2000). Dengan memfokuskan perhatian terhadap aspek potensial di suatu daerah dalam pembangunannya maka akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut.

Kondisi pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat yang juga mendorong pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan upaya suatu negara untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat (Arsyad, 2010). Mewujudkan pembangunan ekonomi yang dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat harus memiliki tujuan inti yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang, peningkatan standar hidup dan perluasan rentang pilihan ekonomi dan sosial (Todaro, 2000).

Pembangunan ekonomi yang optimal perlu memperhatikan potensi aktivitas perekonomian seperti sektor unggulan ekonomi daerah. Kebijakan mengenai pengembangan ekonomi di Indonesia saat ini diatur dalam kebijakan otonomi daerah. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan pemerintah daerah mendapatkan kewenangan seluas – luasnya secara mandiri melakukan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut dapat memberikan kebebasan pemerintah daerah untuk dapat melakukan pembangunan tanpa harus bergantung kepada pemerintah pusat.

Suatu keunggulan atau potensi yang kemungkinan dimiliki oleh suatu daerah akan dapat dikembangkan dan diolah secara efektif dan efisien apabila otonomi daerah dilaksanakan. Otonomi daerah dapat memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah dalam mengidentifikasi, mengolah dan memberdayakan keunggulan komparatif daerah mereka. Dalam merancang pembangunan ekonomi daerah tersebut diperlukan taraf ukur yang dapat memberikan gambaran tentang pertumbuhan ataupun keadaan perekonomian daerah tersebut.

Salah satu taraf ukur pembangunan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Terdapat tujuh belas sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan kerja yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Pengalihan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Salah satu sub sektor dari 17 lapangan usaha PDRB yang memiliki potensi sumber daya yang melimpah di Indonesia adalah sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sektor yang mempunyai peran besar dalam sumbangannya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah, baik dalam hal kontribusi pendapatan maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian juga merupakan sektor yang terus dibutuhkan karena kebutuhan manusia dalam hal pangan untuk keberlangsungan hidup membutuhkan hasil produk pertanian sebagai bahan bakunya. Sektor pertanian dalam ruang lingkupnya mencakup sub sektor tanaman pangan, sub sektor tanaman hortikultura, sub sektor perikanan, sub sektor peternakan, dan sub sektor kehutanan.

Sektor pertanian merupakan salah satu lapangan usaha yang mendukung struktur ekonomi di banyak kabupaten di Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satunya Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu dari 12 kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan, 103 nagari dan 600 jorong yang memiliki keadaan geografi seperti wilayah yang luas, garis pantai yang panjang dan adanya daerah perbukitan yang subur menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor lapangan usaha yang mendominasi di Kabupaten Padang Pariaman.

Kabupaten Padang Pariaman dalam perkembangan ekonomi beberapa tahun terakhir memiliki 3 sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Pariaman antara lain sektor transportasi dan pergudangan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan jsektor industri pengolahan. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman. Pada data PDRB Kabupaten Padang Pariaman menurut lapangan usaha pada tahun 2019 – 2023, distribusi persentase PDRB sektor pertanian memiliki nilai yang berfluktuasi dimana pada tahun 2019 sebesar 19,21% ; pada tahun 2020 sebesar 22,68% ; Pada tahun 2021 sebesar 22,65% ; pada tahun 2022 sebesar 21,37% ; dan pada tahun 2023 sebesar 20,55%. (BPS, Kabupaten Padang Pariaman 2024) (Lampiran 1).

Selain dari besarnya kontribusi yang dihasilkan dari sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman, penyerapan tenaga kerja juga menjadi aspek yang ikut terbantu oleh sektor pertanian dimana sektor pertanian mampu menyerap 30,87% dari 170.516 total tenaga kerja pada tahun 2019, 35,64% dari 183.731 total tenaga kerja pada tahun 2020, 28,60% dari 177.894 total tenaga kerja pada tahun 2021, 30,96 dari 199.513 total tenaga kerja pada tahun 2022, dan 28,91% dari 207.131 total tenaga kerja pada tahun 2023 di Kabupaten Padang Pariaman (BPS, Kabupaten Padang Pariaman 2024) (Lampiran 2).

Menurut Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 – 2026, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu 5 tahun dari 2016 hingga 2020 telah melihat sektor pertanian sebagai sektor potensial dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten

Padang Pariaman. Dimana selain kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan dapat menyerap banyak tenaga kerja, sektor pertanian mempunyai peranan dalam memenuhi ketahanan pangan di Kabupaten Padang Pariaman.

Besarnya potensi sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman yang telah dilihat, maka peneliti tertarik dalam meneliti lebih lanjut bentuk peranan pembangunan wilayah Kabupaten Padang Pariaman oleh kontribusi dari sektor pertanian dengan menggunakan pendekatan teori ekonomi basis untuk dapat menghasilkan bahan masukan baik dalam merancang maupun bahan evaluasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menemukan potensi sektor perekonomian dan alam yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Struktur perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 didominasi oleh 3 sektor, yaitu sektor transportasi dan pergudangan sebesar 21,97%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,55%, dan sektor industri pengolahan sebesar 10,48% (Lampiran 1). Peranan ketiga sektor tersebut mencapai 53 % terhadap total PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Perkembangan total PDRB Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 – 2023 mengalami penurunan dikarenakan pandemi COVID di tahun 2020 yang mengakibatkan penurunan kegiatan perekonomian. Akan tetapi, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga konstan pada periode tahun tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp.2.783.135.460.000; tahun 2020 sebesar Rp.2.791.280.420.000; tahun 2021 sebesar Rp.2.854.894.620.000; tahun 2022 sebesar Rp.3.031.537.030.000; dan tahun 2023 sebesar Rp. 3.148.975.190.000. (BPS Kabupaten Padang Pariaman

2024) (Lampiran 3). Hal ini menunjukkan peranan sektor pertanian yang konsisten terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2021 – 2026, sektor pertanian termasuk ke dalam sektor yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman. Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam perekonomian yang dapat dilihat berdasarkan aspek penyediaan pangan, kontribusinya terhadap PDRB, penyediaan lapangan kerja dan sumbangan devisa melalui ekspor. Dan juga berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 17 Tahun 2021 tentang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 – 2026 memfokuskan pengembangan inovasi daerah terhadap sektor pertanian.

Sektor pertanian yang ada di Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 8 subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor perikanan, subsektor kehutanan, dan subsektor jasa pertanian dan perburuan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No, 105/KEP/BPP/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang komoditi dan Produk Unggulan Daerah, pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman telah mengidentifikasi komoditi atau produk unggulan Kabupaten Padang Pariaman yang dimana produk unggulan tersebut terdapat juga pada subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura dan subsektor perkebunan.

Dilihat dari produksi komoditi pertanian Kabupaten Padang Pariaman pada subsektor tanaman pangan, terdapat komoditi padi yang cenderung mengalami penurunan produksi tiap tahunnya (Lampiran 5). Pada komoditi subsektor hortikultura seperti contohnya komoditi alpukat yang mengalami kenaikan produksi dan komoditi nenas yang cenderung mengalami penurunan produksi setiap tahunnya (Lampiran 6). Kemudian pada komoditi subsektor perkebunan seperti contohnya komoditi kelapa yang cenderung mengalami kenaikan produksi dan komoditi kelapa sawit yang cenderung mengalami penurunan produksi setiap tahunnya pada periode tahun 2019 - 2023 di Kabupaten Padang Pariaman (Lampiran 7).

Dalam usaha memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah sekurang-kurangnya akan berkaitan dengan beberapa hal, salah satunya adalah mendorong

tumbuhnya sektor penggerak utama atau sektor basis yang dimiliki perekonomian daerah tersebut. Sektor basis merupakan sektor yang melakukan aktifitas yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan.

Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor penggerak utama atau unggulan dalam pembangunan suatu wilayah adalah melalui pendekatan *location quotient* (LQ) dan *shift share analysis* (SSA). Melalui pendekatan LQ dapat ditentukan sektor penggerak utama atau unggulan di Kabupaten Padang Pariaman dan SSA menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan pertumbuhan sektor unggulan tersebut. Selain itu melalui pendekatan LQ dan SSA juga dapat ditentukan komoditi unggulan Kabupaten Padang Pariaman.

Sejalan dengan hal tersebut mengingat besarnya potensi sektor pertanian yang dimiliki dan juga kontribusinya terhadap pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman maka perlu diteliti lebih lanjut menyangkut peran sektor pertanian di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan demikian diharapkan nantinya akan dapat di ketahui apakah sektor pertanian dapat dijadikan *leading* sektor atau sektor basis dalam pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman serta komoditi pertanian pada subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, dan subsektor perkebunan apa saja yang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Padang Pariaman.

Kondisi baik dalam sektor pertanian dan komoditi pertanian unggulan di Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Romarina (2020) mengenai sektor unggulan perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2011 - 2016 dan Malronsyah (2016) mengenai komoditi unggulan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2009 - 2013. Penelitian terdahulu tersebut telah menunjukkan potensi sektor pertanian dan komoditi pertanian unggulan yang dimiliki Kabupaten Padang Pariaman dengan tahun acuan data tahun 2009 hingga tahun 2016. Meskipun demikian, penelitian ini dilakukan untuk melihat kondisi terbaru dari sektor pertanian dan komoditi unggulan yang telah ditemukan dengan membandingkannya dengan data terbaru berdasarkan tahun 2019 – 2023. Hal ini juga untuk melihat perkembangan terbaru komoditas unggulan yang sebelumnya

telah ditemukan di Kabupaten Padang Pariaman di tahun sebelumnya bersamaan dengan program – program pembangunan pertanian pemerintah daerah yang telah dilakukan untuk. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”**Analisis Peranan Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Padang Pariaman (Pendekatan *Location Quotient* dan *Shift Share Analysis*)**”

Berdasarkan uraian yang dijelaskan, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah sektor pertanian merupakan sektor unggulan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa saja komoditas pertanian yang menjadi komoditi unggulan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Padang Pariaman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama penelitian ini antara lain :

1. Mengidentifikasi sektor pertanian sebagai sektor unggulan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Padang Pariaman
2. Mengidentifikasi komoditas unggulan pada sektor pertanian yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain :

1. Bagi pemerintah dan instansi daerah terkait, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan perencanaan atau kebijakan pembangunan terkait sektor pertanian di Kabupaten Padang Pariaman
2. Bagi mahasiswa dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi terbaru dan juga dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan peneliti yang berkecimpung di bidang yang sama.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sarana penambah wawasan dan juga sebagai referensi untuk penanganan masalah yang sama di masa depan.